

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi di Kota Bekasi”, yang di latarbelakangi oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Kota Bekasi secara resmi berpindah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut berdampak pada jauhnya jarak dan luasnya koordinasi yang harus dilakukan sehingga dibentuklah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III yang membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam urusan pendidikan menengah di Kota Bekasi. Dampak lain dari adanya kebijakan tersebut ialah penarikan biaya pendidikan menengah di Kota Bekasi yang sebelumnya telah merealisasikan bebas biaya pada tingkat pendidikan menengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengalihan pengelolaan pendidikan menengah di Kota Bekasi dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Smith, dengan empat komponen yaitu; kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan pelaksana dan faktor-faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta beberapa SMA/SMK di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pendidikan menengah dari kab/kota kepada provinsi di Kota Bekasi telah terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat kendala terkait dengan pendanaan pendidikan yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pengalihan Wewenang, Pendidikan Menengah

SUMMARY

This research is entitled “Implementation of the Policy for Transferring the Management of Secondary Education from the Regency/City to the Province in Bekasi City”, which is motivated by the enactment of Law number 23 of 2014 about Local Government, where the management of secondary education (The Senior High School/Vocational High School) which was previously held by the Bekasi City Government has officially moved to Province Government of West Java. This policy had an impact on the extent of the distance and coordination that had to be carried out so that a Region III Education Department Branch formed to assist the West Java Provincial Education Department in matters of secondary education in Bekasi City. Another impact of this policy is the withdrawal of the secondary education fees in Bekasi City, which previously had accomplished free tuition the secondary education level.

The purposes of this research was to determine of implementation of the transfer of management of secondary education in Bekasi City using the implementation theory by Smith, he describe it has four components; Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, and Environmental Factors. This study using descriptive qualitative method. This research was conducted in the Region III Education Department Branch, Bekasi City Education Department also several Senior High School/Vocational High Schools in Bekasi City. The results of this research indicate that the implementation of secondary education management from the districts/cities to the provinces in Bekasi City runs quite well although there are still obstacles related to existing education funding.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Transfer of Authority, Secondary Education*